

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah telah dilaksanakan sejak pemerintahan orde baru yaitu sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Namun Undang Undang tersebut dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi yaitu masih dominannya kontrol dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pada masa reformasi Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 digantikan dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dan juga Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Selain itu pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan.

Terkait dengan besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diterima pemerintah daerah, maka perlu adanya pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2005) dalam Ayuningtyas (2012:1) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian

dan pemeriksaan. Fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh dewan legislatif (DPR/DPRD) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab dan Keuangan Negara, BPK sebagai auditor pemerintah eksternal melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK-RI No. 01 tahun 2007. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan Hasil Pemeriksaan memuat opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa.

Hasil pemeriksaan sangat penting perannya bagi pemerintah daerah atau instansi yang diperiksa. Hasil pemeriksaan dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Selain itu, hasil pemeriksaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan. Oleh karena itu, pentingnya hasil pemeriksaan menuntut adanya kualitas pemeriksaan yang baik sehingga hasil pemeriksaan dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan yang berkualitas adalah pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan pemeriksaan.

Kualitas pemeriksaan bergantung pada karakteristik auditor sebagai pemeriksa. Pemeriksa dituntut untuk memiliki independensi dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksa yang memiliki sikap independen akan terbebas dari berbagai kepentingan dari pihak luar sehingga akan berpengaruh terhadap

kualitas pemeriksaan. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad *et al.*, (2011:71) ditemukan bahwa independensi aparat inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada taraf signifikansi 5%. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al.*, (2010:15) bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. Namun penelitian-penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Sukriah *et al.*, (2009:19) serta Maburi dan Winarna (2010:16) yang menghasilkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Objektivitas pemeriksa juga dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan. Cara berfikir pemeriksa yang tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh pihak ketiga akan menghasilkan pemeriksaan yang bersih. Penelitian yang dilakukan Sukriah *et al.*, (2009:20) serta Maburi dan Winarna (2010:17) menghasilkan bahwa objektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit/pemeriksaan.

Pengalaman pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil. Pemeriksa diharapkan memberikan keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Pada penelitian yang dilakukan Sukriah *et al.*, (2009:18) serta Maburi dan Winarna (2010:18), pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil audit/pemeriksaan. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Singgih dan Bawono (2010:19), penelitian tersebut menghasilkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengetahuan pemeriksa tentang entitas yang diperiksa maupun pengetahuan umum akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam

melakukan pemeriksaan sehingga juga akan berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan yang dilakukan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna (2010:18) serta Asrori (2011:44) menghasilkan bahwa pengetahuan auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Integritas pemeriksa juga mempengaruhi kualitas audit. Semakin tinggi integritas pemeriksa semakin baik pula audit yang dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna (2010:18) bahwa integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. Namun kali ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sukriah *et al.*, (2009:20) bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Sikap akuntabilitas pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan juga berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan. Semakin pemeriksa mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan yang diambilnya, semakin baik kualitas pemeriksaan yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Singgih dan Bawono (2010:19) menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap variabel kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mardisar dan Sari (2007:17) menghasilkan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan positif dengan kualitas hasil kerja dengan kompleksitas tugas yang rendah namun tidak memiliki pengaruh signifikan untuk kompleksitas pekerjaan yang tinggi.

Dan yang terakhir adalah sikap skeptis yang dimiliki pemeriksa juga dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Semakin skeptis seorang pemeriksa maka akan semakin mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit (Januarti dan Faisal, 2010:4). Dalam penelitian yang dilakukan Januarti dan Faisal (2010:20) menunjukkan skeptisisme profesional auditor mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas hasil audit.

Adanya beberapa ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu tersebut maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas, akuntabilitas dan skeptisisme profesional pemeriksa terhadap kualitas pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna (2010) yaitu Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan Sukriah *et al.*, (2009), Ahmad *et al.*, (2011), Wati *et al.*, (2010), Singgih dan Bawono (2010), Januarti dan Faisal (2010), serta Mardisar dan Sari (2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Mabruri dan Winarna (2010) adalah penambahan dua variabel yaitu akuntabilitas dan skeptisisme profesional. Dua variabel tersebut diadopsi dari penelitian yang dilakukan Januarti dan Faisal (2010) serta Singgih dan Bawono (2010). Selain itu penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor swasta seperti KAP dan auditor internal pemerintah seperti Inspektorat dan BPKP kecuali penelitian yang dilakukan Januarti dan Faisal (2010) objek penelitian yang digunakan adalah BPK-RI. Objek dari penelitian ini adalah auditor eksternal pemerintah yaitu dilakukan di BPK Perwakilan Jawa Timur

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan?

2. Apakah objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan ?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan ?
4. Apakah pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan?
5. Apakah integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan ?
6. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan?
7. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan ?

1.2. Tujuan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh objektivitas terhadap kualitas pemeriksaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas pemeriksaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kualitas pemeriksaan.
5. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas pemeriksaan.
6. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas pemeriksaan.
7. Untuk mengetahui pengaruh skeptisisme profesional terhadap kualitas pemeriksaan.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan tentang permasalahan yang ada yaitu tentang hal-hal yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

2. Bagi Pihak Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu terutama tentang audit/pemeriksaan dalam dunia akademis.

3. Bagi BPK Perwakilan Jawa Timur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi BPK Perwakilan Jawa Timur untuk meningkatkan independensi, objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, integritas, akuntabilitas, dan skeptisisme profesional pemeriksanya sehingga kualitas pemeriksaan yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik.